



SINERGI PEMKOT-PEMDA DIY PUNGUT OPSEN PAJAK KENDARAAN

Digitalisasi Keuangan Daerah Perkuat Sektor PAD Kota Yogya

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan terus menggenjot upaya digitalisasi keuangan daerah. Selain sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, upaya tersebut juga memberikan kemudahan hingga mampu memperkuat sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Komitmen tersebut diungkapkan Wakil Walikota Yogya Wawan Harmawan di sela High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di kompleks Balai Kota Yogya, Kamis (31/7). "Kita saat ini sedang memperkuat PAD. Sehingga HLM sangat efektif karena dihadiri oleh para pemangku kebijakan. Ini karena selalu muncul tantangan sehingga kita pun harus bekerja cepat," ungkap Wawan.

HLM tersebut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Hermanto, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Aria Nugrahadi, Direktur Utama PT Bank BPD DIY Santoso Rohmad beserta para ja-

garan di tingkat Pemkot Yogya dan Pemda DIY. Pertemuan para pengampu kebijakan tersebut secara khusus membahas tentang sinergi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara Pemkot Yogya dan Pemda DIY.

Wawan berharap HLM bisa rutin digelar guna mengantisipasi perkembangan digitalisasi keuangan daerah. Forum tersebut bahkan bukan sekadar administratif melainkan bentuk nyata tanggungjawab unsur pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat sebagai wajib pajak. Dengan demikian melalui forum itu pula dapat dihasilkan penyusunan kebi-

jakan yang aplikatif. "Saya mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi dan komitmen lintas sektor. Jadikan HLM TP2DD sebagai lokomotif digitalisasi keuangan daerah yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tandasnya.

Sementara Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Hermanto, mengaku tahun ini masing-masing daerah dituntut mampu menyusun peta jalan TP2DD sebagai tindak lanjut Perpres 82/2023. Dirinya pun mengapresiasi Pemkot Yogya melalui inovasi Kopi Qrisna yang mampu menjadi terbaik kedua nasional dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 lalu. Sehingga selain menyusun roadmap TP2DD, Hermanto berharap tahun ini kembali muncul inovasi yang digagas Pemkot Yogya.

Terkait opsen PKB dan BBNKB, menurut Hermanto menjadi poin penting lantaran mampu memberikan tambahan fiskal bagi Pemkot

Yogya. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola yang semakin transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan pajak kendaraan bermotor.

"Pemungutan PKB dan BBNKB memiliki potensi besar namun juga menyimpan tantangan. Sehingga sinergi ini sangat penting," tandasnya.

Direktur Utama PT Bank BPD DIY Santoso Rohmad, mengaku sebagai pemegang kas daerah pihaknya akan berperan aktif dalam memberikan pelayanan terbaik dalam segala aspek. Termasuk layanan pembayaran PKB dan BBNKB melalui digitalisasi transaksi. Menurutnya, layanan digital dalam pembayaran pajak memiliki efisiensi serta akan mempercepat perputaran keuangan.

Sedangkan merujuk Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, tertuang rencana target penerimaan PKB dan BBNKB di wilayah Kota Yogya masing-masing



Para jajaran TP2DD Yogyakarta menunjukkan komitmen kesepahaman bersama di sela HLM terkait opsen PKB dan BBNKB.

sebesar Rp 119,1 miliar dan Rp 38,6 miliar. Sehingga estimasi opsen PKB dan opsen BBNKB yang akan diterima oleh Pemkot Yogya adalah masing-masing sebesar Rp 69,9 miliar dan Rp 25,5 miliar.

Pemkot Yogya berkomitmen untuk memanfaatkan minimal 1,2% dari penerimaan opsen PKB dan 1,1% dari penerimaan opsen

BBNKB untuk penguatan sarana dan prasarana. Termasuk pengadaan mobil operasional Samsat Kota Yogya. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, tetapi juga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005